

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang maupun suatu badan organisasi yang melakukan sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dan memakmurkan kebutuhan masyarakat (Murti, 1997 dalam Noviawan & Septiani, 2013). Perusahaan yang pada awalnya dikelola langsung oleh pemiliknya, menghadapi kendala dimana pemilik tidak lagi mampu menjalankan roda perusahaan. Hal ini menunjukkan sinyal yang positif dimana perusahaan dikelola dengan baik sehingga mampu untuk terus berkembang. Pada tahap ini, pemilik mendelegasikan wewenang kepada manajer atau agen untuk melakukan tindakan dalam usaha memajukan perusahaan dan mendapatkan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang sebelumnya dipegang oleh pemilik.

Di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan arus informasi yang pesat sehingga menuntut perusahaan dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna informasi, seperti investor dan *stakeholder*. Hal tersebut menyebabkan persaingan antar perusahaan menjadi ketat dan kompetitif. Tujuan perusahaan berubah bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain agar keberlangsungan perusahaan tetap berjalan dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna.

Perusahaan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk entitas terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan kinerja operasional yang beroperasi secara sistematis untuk mencapai sasaran tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah tujuan yang harus ingin semua pemangku berkepentingan dalam perusahaan (*stakeholder and shareholder*). Perusahaan untuk mencapai tujuannya dapat melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan dengan berhati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lain yang berdampak terhadap nilai perusahaan (Jensen dan Smith, 1994; Fama & Frech, 1998 dalam Hadis T et al., 2019). Sehingga perusahaan yang terlibat di dalamnya diharuskan untuk berkerja sama secara sistematis dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna menghasilkan kinerja perusahaan yang optimal..

Kinerja perusahaan sendiri merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, perusahaan terus berusaha untuk terus meningkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan merupakan alat ukur bagi investor untuk menilai suatu perusahaan, pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan keputusan yang diambil oleh manajer (Sari et al., 2017). Menurut Suhendro (2018) kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap kondisi perusahaan atas usaha manajemen dalam melaksanakan fungsinya dalam suatu periode. Mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui dua sisi yaitu: sisi internal perusahaan dengan melihat laporan keuangan dan sisi eksternal perusahaan yaitu nilai perusahaan dengan cara menghitung kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan (Sarafani & Saifi, 2017). Penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai variabel yang menunjukkan

kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini dapat memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan dapat menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan melihat tingkat *Return On Asset* (ROA) maka dapat diukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit perusahaan, yang juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para manajer untuk membuat keputusan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (2014) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dapat diwujudkan dengan adanya penerapan tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui penerapan pengawasan GCG di perusahaan diharapkan penerapan GCG dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam meningkatkan usaha dengan memperhatikan *stakeholders* untuk mencapai tujuan perusahaan (Rimardhani *et al.*, 2016). Penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang baik didalam perusahaan, dapat membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik dan menjadikan perusahaan yang bersih dari tindak kecurangan serta dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders* dan publik. Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah kurangnya rasa profesional dalam menjalankan suatu perusahaan.

Kebutuhan akan praktik *corporate governance* sebenarnya bukan fenomena yang baru. Berles dan Means (1932); Berthelot, Morris, dan Morrill (2010) dalam (Noviawan & Septiani, 2013) telah berpendapat bahwa para manajer harus dikontrol dan diawasi dalam rangka mencegah kerugian bagi perusahaan. Terungkapnya skandal dan bentuk korupsi korporasi terbesar dalam

sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five* saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen (Sekaredi, 2012).

Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan *mark-up* laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur Andersen ditutup secara global (Bukhori & Raharja, 2012). Hal ini berarti praktik *corporate governance* masih lemah sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat.

Akibat praktik *Corporate Governance* yang buruk pada perusahaan besar akan menimbulkan krisis ekonomi dalam meningkatkan nilai perusahaan, dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) terdapat fenomena pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba Corporation yang merupakan perusahaan besar di Jepang dan telah menduduki peringkat 9 dari 120 perusahaan public yang menerapkan *Good Corporate Practice*. Berdasarkan berita tersebut, bahwa hasil dari penyelidikan yang dilakukan komite independen, selama beberapa tahun terakhir Toshiba melakukan pemalsuan laporan keuangan dengan meningkatkan keuntungan sebesar US \$ 1.2. Pemalsuan laporan keuangan tersebut diakibatkan dengan adanya target laba yang terlalu tinggi yang dilakukan keuangan. Apabila komisaris tidak membentuk panel independen untuk melakukan pengawasan pada kasus Toshiba kemungkinan kasus tersebut tidak terungkap, karena dari komisaris independen dapat terungkap keurangan yang dapat didalam perusahaan.

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa konflik *corporate governance* muncul karena terjadinya pemisahan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini didasarkan pada *agency theory* yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan pribadinya daripada tujuan perusahaan. Dalam upaya mengatasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemegang saham, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan terhadap manajemen perusahaan adalah dengan menerapkan mekanisme *corporate governance*.

Penerapan mekanisme *Corporate Governance* yang tepat dapat meningkatkan efektivitas perusahaan tersebut sehingga dapat melaporkan kegiatan usahanya dengan baik melalui laporan keuangan sebagai sumber informasi kepada *stakeholder* (Sari & Priyadi, 2017). Mekanisme *Corporate Governance* dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan karena mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan menyelaraskan perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal*, *principal* (pemegang saham) dengan *principal* lainnya (pemberi pinjaman), serta diantara pihak-pihak yang berkepentingan (Sarafani & Saifi, 2017).

Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Mekanisme tersebut dianggap mampu mengendalikan dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir masalah keagenan yang mungkin terjadi akibat perbedaan kepentingan.

Menurut Yuliani, (2018) Komisaris Independen sebagai salah satu pihak yang dianggap penting dalam membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam perusahaan. Komisaris Independen juga merupakan bagian yang bertanggungjawab mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi meski ada konflik kepentingan.

Veronika et al., (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh, *Good Coporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Begitu pula beberapa penelitian menyatakan hasil yang sama, penelitian Sarafani & Saifi, (2017) dan Yunizar & Rahardjo, (2014), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun ada beberapa penelitian menyatakan hasil yang sebaliknya, penelitian Sembiring & Saragih, (2019) dan Mulyasari et al., (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Suaryana, (2005) menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses laporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tanggung jawab komite audit meliputi penelaah atas kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan, evaluasi pengendalian internal, penelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Susilo & Fuad, (2018) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian

yang dilakukan Agatha et al., (2018) dan Alfian, (2019) bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utomo & Rahardjo, (2014) dan Shanti, (2020) menyatakan bahwa komite audit tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi-institusi keuangan, seperti asuransi, bank, dana pensiun, dan investment bank (Siregar & Dr. Siddharta Utama, 2005). Institusi merupakan suatu lembaga yang memiliki kepentingan yang besar terhadap investasi yang telah dilakukan termasuk investasi saham yang diserahkan kepada divisi tertentu untuk bertanggung jawab terhadap investasi tersebut. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka di perusahaan. Moh'd, dkk, (1998) dalam Indriani & Nurkholis, (2002) Kepemilikan oleh institusional dapat menurunkan *agency cost*, karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hasil penelitian Monica & Dewi, (2019) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Mattiara et al., (2020) dan Putri & Dewi, (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi, penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Wehdawati et al., (2015) dan Ratnasari et al., (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain mekanisme *Corporate Governance* di atas, terdapat faktor lain yang mendasari kontribusi peningkatan kinerja keuangan. Faktor tersebut antara

lain/*leverage*. *Leverage* merupakan proporsi hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan Kurniawan, (2014). Menurut Yuliani, (2018) rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari utang dan modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aset tetap dengan modal yang ada.

Menurut sudut pandang manajemen keuangan, rasio *leverage* membawa implikasi penting dalam pengukuran risiko finansial perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang menunjukkan semakin besar kepercayaan dari pihak luar, hal ini sangat memungkinkan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena dengan modal yang besar maka kesempatan untuk meraih tingkat keuntungan juga besar. Menurut Azzahra & Nasib, (2019) dan Erawati & Wahyuni, (2019) hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama pada penelitian Irma, (2019) dan Lestari & Dewi, (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Damarjati & Fuad, (2019) memiliki hasil yang bertolak belakang, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Aziz & Ulil, (2017) memiliki hasil yang serupa, bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang atas permasalahan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Komisaris independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian



ini merupakan penelitian replikasi dari Sembiring & Saragih, (2019) dengan judul Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan variabel independen antara lain kepemilikan Institusional dan *Leverage* serta obyek penelitian ini menggunakan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode 2016-2020..

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bebetapa manfaat sebagai berikut:

##### 1. **Manfaat Praktis**

Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi tambahan mengenai pentingnya penerapan dan pengungkapan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan *leverage*.

Penelitian ini juga dapat memberikan bahan pertimbangan bagi investor dalam menetapkan pilihan investasi yang tepat, bagi elemen penelitian ini dapat menjadi masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja keuangan.

##### 2. **Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan ilmu akuntansi yakni sebagai referensi yang dapat memberikan informasi baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang komosaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan dimasa depan.